

MODUL 1 PENILAIAN DOKUMEN

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024



Nama Penilai :

Provinsi Dinilai :

Kabupaten /Kota Dinilai :

*Digital evaluation system is available at
www.peppd.bappenas.go.id*

Petunjuk Penilaian

1. Penilaian dikelompokkan dalam 5 kriteria dan 24 indikator.
2. Masing-masing indikator terdiri dari beberapa item penilaian.
3. Setiap item penilaian terdiri dari dua pilihan kategori yang bernilai "0" atau "1".
4. Tim penilai menentukan skor masing-masing pada item penilaian.
5. Nilai untuk masing-masing indikator adalah akumulasi dari skor item penilaian pada indikator yang bersesuaian, dengan rumusan:

$$\text{Nilai indikator (i)} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh item pada indikator (i)}}{\text{Jumlah item pada indikator (i)}} \times 10$$

- ❖ Dengan demikian, setiap indikator memiliki nilai minimum "0" dan maksimum "10".
 - ❖ Pengisian nilai untuk setiap indikator dapat mengacu pada panduan pemberian nilai yang terdapat di bagian akhir setiap indikator.
 - ❖ Pemberian nilai dilakukan dengan menuliskan nilai yang bersesuaian dengan total skor ke dalam kotak nilai yang berada pada pojok kanan atas.
6. Total skor suatu daerah merupakan akumulasi dari seluruh indikator dengan memperhatikan bobot masing-masing indikator

$$\text{Total skor} = \sum_{i=1}^{24} \text{Nilai indikator (i)} \times \text{bobot indikator (i)}$$

7. Setiap daerah dinilai oleh 3 orang penilai teknis.
8. Nilai akhir penilaian perencanaan dan pelaksanaan RKPD adalah nilai tengah dari 3 tim penilai teknis.
9. Penilaian aspek pencapaian pembangunan menggunakan data terakhir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPD.



Penjelasan Kriteria dan Indikator

Kriteria	Indikator	Bobot
Aspek Pencapaian Pembangunan (40%)		
Pencapaian	1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan	5,00%
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,00%
	3. Kemiskinan	7,00%
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	7,00%
	5. Ketimpangan	5,00%
	6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan	5,00%
	7. Transparansi dan Akuntabilitas	5,00%
Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan (40%)		
Sinergi dan Keterkaitan (14,50%)	8. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	2,50%
	9. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah	1,50%
	10. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD/RPD dengan Prioritas Nasional (PN) RPJMN	2,00%
	11. Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD/RPD untuk mendukung program prioritas dalam RPJMN	2,00%
	12. Keselarasan Indikator Makro dan SPM RPJMD/RPD dengan RPJMN (Tahun 2024)	2,00%
	13. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD	2,00%
	14. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024	2,50%
Konsistensi (11%)	15. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024	2,50%
	16. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024	2,50%
	17. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah	3,00%
	18. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran	3,00%
Kelengkapan dan Kedalaman (14,5%)	19. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan	2,50%
	20. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN RKP 2024	6,00%
	21. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	3,00%
	22. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas	3,00%
Aspek Inovasi (20%)		
Inovasi	23. Kelengkapan dokumen inovasi daerah	5,00%
	24. Kedalaman inovasi daerah	15,00%



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 1

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan

Bobot 5,00%

No.	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. Pertumbuhan Ekonomi				
1	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD	Pertumbuhan ekonomi daerah kurang dari 90% kinerja pencapaian target RKPD atau tidak ada target RKPD	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih dari atau sama dengan 90% kinerja pencapaian target RKPD	
2	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian tahun sebelumnya	Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari capaian tahun sebelumnya	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik atau sama dengan capaian tahun sebelumnya	
3	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari rata – rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik atau sama dengan rata – rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik atau sama dengan capaian nasional	
B. Inklusivitas Pembangunan				
1	Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) daerah dengan target RKPD	PDRB per kapita (ADHK) daerah belum mencapai target RKPD atau tidak ada target RKPD	PDRB per kapita (ADHK) daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
2	Perbandingan PDRB per kapita (ADHB) daerah dengan target RKPD	PDRB per kapita (ADHB) daerah belum mencapai target RKPD atau tidak ada target RKPD	PDRB per kapita (ADHB) daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
3	Perbandingan rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian nasional	Rasio perubahan TPT dengan pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Rasio perubahan TPT dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
4	Perbandingan rasio perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian nasional	Rasio perubahan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Rasio perubahan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
5	Perbandingan rasio perubahan rasio gini dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian nasional	Rasio perubahan rasio gini dengan pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Rasio perubahan rasio gini dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Perhitungan berdasarkan Skoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) diolah
- Wilayah setara merupakan pembagian wilayah sesuai dengan RPJMN

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai	0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,6	6,7	7,8	8,9	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 2

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Bobot 6,0%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah kurang dari 90% kinerja pencapaian target RKPD atau tidak ada target RKPD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah lebih dari atau sama dengan 90% kinerja pencapaian target RKPD	
2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian tahun sebelumnya	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah tidak lebih baik dari capaian tahun sebelumnya	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah lebih baik atau sama dengan capaian tahun sebelumnya	
3	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah tidak lebih baik dari rata – rata capaian wilayah yang setara	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah lebih baik atau sama dengan rata – rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah lebih baik atau sama dengan capaian nasional	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Perhitungan berdasarkan Skoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) diolah
- Wilayah setara merupakan pembagian wilayah sesuai dengan RPJMN

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 3

3. Kemiskinan

Bobot 7,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. Tingkat Kemiskinan				
1	Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan target RKPD	Tingkat kemiskinan daerah kurang dari 90% kinerja pencapaian target RKPD atau tidak ada target RKPD	Tingkat kemiskinan daerah lebih dari atau sama dengan 90% kinerja pencapaian target RKPD	
2	Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian tahun sebelumnya	Tingkat kemiskinan daerah tidak lebih baik dari capaian tahun sebelumnya	Tingkat kemiskinan daerah lebih baik atau sama dengan capaian tahun sebelumnya	
3	Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Tingkat kemiskinan daerah tidak lebih baik dari rata – rata capaian wilayah yang setara	Tingkat kemiskinan daerah lebih baik atau sama dengan rata – rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional	Tingkat kemiskinan daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Tingkat kemiskinan daerah lebih baik atau sama dengan capaian nasional	
B. Indeks Kedalaman Kemiskinan				
1	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah> 0	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah≤ 0	
2	Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Perhitungan berdasarkan Skoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) diolah
- Wilayah setara merupakan pembagian wilayah sesuai dengan RPJMN

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6
Nilai	0	1,67	3,33	5	6,67	8,33	10

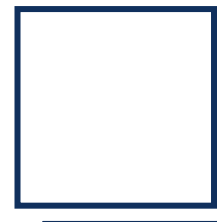


❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 4

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Bobot 7,00%



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan target RKPD	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah kurang dari 90% kinerja pencapaian target RKPD atau tidak ada target RKPD	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih dari atau sama dengan 90% kinerja pencapaian target RKPD	
2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan capaian tahun sebelumnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tidak lebih baik dari capaian tahun sebelumnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik atau sama dengan capaian tahun sebelumnya	
3	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tidak lebih baik dari rata – rata capaian wilayah yang setara	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik atau sama dengan rata – rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dengan capaian nasional	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik atau sama dengan capaian nasional	
B. Angka Harapan Hidup (AHH)				
1	Perbandingan AHH daerah dengan target RKPD	AHH daerah tidak lebih baik dari target RKPD atau tidak ada target RKPD	AHH daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
2	Perbandingan pertumbuhan AHH daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan AHH daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Pertumbuhan AHH daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)				
1	Perbandingan RLS daerah dengan target RKPD	RLS daerah tidak lebih baik dari target RKPD atau tidak ada target RKPD	RLS daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
2	Perbandingan pertumbuhan RLS daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan RLS daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Pertumbuhan RLS daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
D. Harapan Lama Sekolah (HLS)				
1	Perbandingan HLS daerah dengan target RKPD	HLS daerah tidak lebih baik dari target RKPD atau tidak ada target RKPD	HLS daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
2	Perbandingan pertumbuhan HLS daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan HLS daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Pertumbuhan HLS daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
E. Pengeluaran per Kapita (Disesuaikan)				
1	Perbandingan pengeluaran per kapita daerah dengan target RKPD	Pengeluaran per kapita daerah tidak lebih baik dari target RKPD atau tidak ada target RKPD	Pengeluaran per kapita daerah sama atau lebih baik dari target RKPD	
2	Perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Perhitungan berdasarkan Skoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) diolah
- Wilayah setara merupakan pembagian wilayah sesuai dengan RPJMN

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai	0	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

5. Ketimpangan

Bobot 5,00%

Nilai 5

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan				
1	Perbandingan rasio gini daerah dengan target RKPD	Rasio gini daerah kurang dari 90% kinerja pencapaian target RKPD atau tidak ada target RKPD	Rasio gini daerah lebih dari atau sama dengan 90% kinerja pencapaian target RKPD	
2	Perbandingan rasio gini daerah dengan capaian tahun sebelumnya	Rasio gini daerah tidak lebih baik dari capaian tahun sebelumnya	Rasio gini daerah lebih baik atau sama dengan capaian tahun sebelumnya	
3	Perbandingan rasio gini daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Rasio gini daerah tidak lebih baik dari rata – rata capaian wilayah yang setara	Rasio gini daerah lebih baik atau sama dengan rata – rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan rasio gini daerah dengan capaian nasional	Rasio gini daerah tidak lebih baik dari capaian nasional	Rasio gini daerah lebih baik atau sama dengan capaian nasional	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Perhitungan berdasarkan Skoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) diolah
- Wilayah setara merupakan pembagian wilayah sesuai dengan RPJMN

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 6

6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan

Bobot 5,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1	Ketepatan waktu dalam pengesahan APBD T.A. 2024	Tidak tepat waktu (setelah 31 Desember 2023)	Tepat waktu (sebelum 31 Desember 2023)*	
2	Proporsi besaran SILPA	Lebih atau sama dengan 30%	Kurang dari 30%	
3	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan kesehatan	Tidak	Ya	
4	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan investasi	Tidak	Ya	
5	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan kependudukan	Tidak	Ya	
6	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan publik lainnya	Tidak	Ya	
7	Nilai mutu pelayanan berdasarkan rata-rata nilai IKM tahun 2023**	Mutu pelayanan B, C, atau D	Mutu pelayanan A	
8	Skor Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI	Merah dan Kuning	Hijau	
Jumlah Skor				

Catatan: *) Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2024

**) Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 7

7. Transparansi dan Akuntabilitas

Bobot 5,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
A. Transparansi				
1	Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	Tidak ada	Ada	
2	OPD yang melapor kepada PPID	Tidak ada	Ada	
3	Tingkat laporan OPD kepada PPID	OPD yang melapor kepada PPID kurang dari 50%	OPD yang melapor kepada PPID minimal 50%	
4	Keberadaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Tidak ada	Ada	
5	Penggunaan aplikasi KRISNA SELARAS	Belum menggunakan	Sudah menggunakan	
6	Pemanfaatan <i>e-planning</i> untuk <i>tagging</i> Prioritas Nasional (PN)	Belum menggunakan	Sudah menggunakan dengan <i>tagging</i> Prioritas Nasional (PN)	
7	Tersedianya informasi APBD hingga ke level kegiatan secara <i>online</i>	Belum tersedia atau Sudah tersedia tapi tidak dapat diakses publik	Sudah tersedia dan dapat diakses publik	
B. Akuntabilitas				
1	Opini BPK atas laporan keuangan daerah pada tahun terakhir	Disclaimer atau WDP	WTP	
2	Hasil penilaian SAKIP pada tahun terakhir	Selain A dan AA	A dan AA	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai	0	1,11	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10



Penilaian Kualitatif Aspek Pencapaian Pembangunan

Keunggulan Daerah pada Aspek Pencapaian Pembangunan

Rekomendasi terhadap Aspek Pencapaian Pembangunan

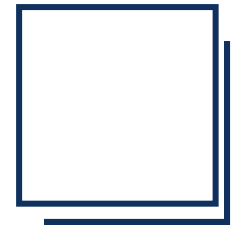


❖ **Kriteria Keterkaitan (14.5%)**

Nilai 8

8. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Bobot 2,50%



No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
1	Ketersediaan regulasi (Pergub/Perwal/Perbup)	Tidak ada	Ada	
2	Penunjukan Walidata definitif	Tidak	Ya	
3	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	
4	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Belum tersedia	Sudah tersedia	
5	Tersedia Daftar Data Prioritas Pusat yang telah diakomodasi dalam pengumpulan Daftar Data Daerah	Belum tersedia	Sudah tersedia	
6	Tersedia Daftar Data Daerah yang memiliki standar data	Belum tersedia	Sudah tersedia	
7	Tersedia Daftar Data Daerah yang memiliki metadata	Belum tersedia	Sudah tersedia	
8	Portal Data Daerah terhubung dengan Portal SDI	Tidak	Ya	
9	Kepemilikan akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI	Belum memiliki	Sudah memiliki	
10	Pemanfaatan data untuk Perencanaan Pembangunan	Belum menggunakan	Sudah menggunakan	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

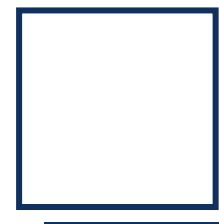


❖ **Kriteria Keterkaitan (14,5%)**

Nilai 9

9. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Bobot 1,50%



No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
1	Keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Tidak ada	Ada	
2	Tersedianya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tidak ada	Ada dan berfungsi	
3	Bentuk dukungan regulasi daerah terhadap manajemen resiko pembangunan	Perkada, peraturan dinas, dll	Perda	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3
Nilai	0	3,33	6,67	10



❖ Kriteria Keterkaitan (14.5%)

10. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD/RPD dengan Prioritas Nasional (PN) RPJMN

Bobot 2,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
1	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	Tidak ada tabel persandingan	Adanya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	
2	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	Kurang dari 50% tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	Minimal 50% tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	
3	Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	Tidak ada tabel persandingan	Adanya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	
4	Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	Kurang dari 50% Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	Minimal 50% Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ **Kriteria Keterkaitan (14,5%)**

11. Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD/RPD untuk mendukung program prioritas dalam RPJMN
Bobot 2,00%



No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
1	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	
2	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	
3	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	
4	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
5	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	
6	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	
7	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 7 RPJMN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah	Kurang dari 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 7 RPJMN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah	Minimal 50% tingkat Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung program prioritas dalam PN 7 RPJMN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah	
JUMLAH SKOR				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7
Nilai	0	1,43	2,86	4,29	5,71	7,14	8,57	10



❖ Kriteria Keterkaitan (14,5%)

Nilai 12

12. Keselarasan Indikator Makro dan SPM RPJMD/RPD dengan RPJMN (Tahun 2024)

Bobot 2,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per item		Skor
		0	1	
1	Keselaran Target Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada RPJMD dengan Target pada RPJMN	Target indikator pertumbuhan ekonomi pada RPJMD belum selaras dengan Target pada RPJMN	Target Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada RPJMD selaras dengan Target pada RPJMN	
2	Keselaran Target Indikator Tingkat Kemiskinan pada RPJMD dengan Target pada RPJMN	Target Indikator Tingkat Kemiskinan pada RPJMD dengan Target pada RPJMN belum selaras	Target Indikator Tingkat Kemiskinan pada RPJMD dengan Target pada RPJMN selaras	
3	Keselaran Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada RPJMD dengan Target pada RPJMN	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada RPJMD dengan Target pada RPJMN belum selaras	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada RPJMD dengan Target pada RPJMN selaras	
4	Ketersediaan komponen SPM RPJMD sesuai RPJMN	Tidak tersedia	Tersedia	
5	Keselaran SPM RPJMD dengan SPM RPJMN	Kurang dari 50% SPM RPJMD selaras dengan SPM RPJMN	Minimal 50% SPM RPJMD selaras dengan SPM RPJMN	
Jumlah Skor				

Catatan:

- Asumsi selaras memiliki minimal 90% dari target makro
- SPM berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Keterkaitan (14,5%)

13. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD

Nilai 13

Bobot 2,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan bersumber dari RPJMD/RPD	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan tidak sama dengan RPJMD/RPD	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan sama dengan RPJMD/RPD	
2	Tema RKPD 2024 bersumber dari arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Tema RKPD 2024 tidak sesuai dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Tema RKPD 2024 sesuai dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	
3	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 tidak mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Ada prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 yang mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	
4	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Tidak seluruh prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	Seluruh prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2024	
Jumlah Skor				

Catatan:

- 1) Untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 (memiliki RPJMD yang berakhir pada 2023) mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
- 2) Untuk daerah yang belum memiliki RPJMD/RPD mengacu pada RPJPD atau dokumen transisi

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ **Kriteria Keterkaitan (14,5%)**

14. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran PN RKP 2024	Tidak ada keterkaitan	Ada keterkaitan	
2	Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD 2024 dengan sasaran PN RKP 2024	Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP 2024	Minimal 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP 2024	
3	Tersedianya tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RKPD 2024 dengan sasaran PN RKP 2024	Tidak ada	Ada	
4	Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan PN RKP 2024	Tidak ada keselarasan	Ada keselarasan	
5	Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP 2024	Kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP 2024	Minimal 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP 2024	
6	Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2024	Tidak ada dan/atau tidak sesuai	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6
Nilai	0	1,7	3,3	5	6,7	8,3	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,00%)

15. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024

Nilai 15

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022	Evaluasi dilakukan tidak untuk seluruh urusan wajib	Evaluasi dilakukan untuk seluruh urusan wajib	
2	Data pendukung evaluasi pelaksanaan RKPD 2022	Kurang dari 50% data pendukung merupakan capaian tahun 2022 atau 2023	Minimal 50% data pendukung merupakan capaian tahun 2022 atau 2023	
3	Keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi Cat: evaluasi dilengkapi dengan data pendukung	Tidak seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan	Seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan	
4	Ketersediaan isu strategis Cat: isu strategis tertulis secara eksplisit	Tidak ada isu strategis	Ada isu strategis	
5	Kedalaman penjelasan tentang isu strategis Cat: sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD/RPD, dan 4) Arah kebijakan RKP	Sumber perumusan isu strategis kurang dari dua	Minimal ada dua sumber perumusan isu strategis	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,00%)

Nilai 16

16. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	Tidak ada prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan	Ada prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan	
2	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	Tidak semua isu strategis menjadi prioritas pembangunan daerah	Semua isu strategis menjadi prioritas pembangunan daerah	
3	Prioritas pembangunan daerah memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD dan/atau janji tahunan Kepala Daerah	Tidak memuat sama sekali	Minimal ada satu yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3
Nilai	0	3,33	6,67	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,00%)

17. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah

Bobot 3,00%

Nilai 17

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1	Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas	Tidak ada	Ada	
2	Tersedianya penanggungjawab (OPD) untuk masing - masing program prioritas	Tidak ada	Ada	
3	Tersedianya indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah	Tidak ada	Ada	
4	Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas	Tidak ada	Ada	
5	Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas	Tidak semua indikator kinerja program terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan	Semua indikator kinerja program terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan	
Jumlah Skor				

Program Prioritas merupakan penjabaran dari prioritas daerah yang memiliki kejelasan implikasi kebijakan

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,00%)

Nilai 18

18. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran

Bobot 3,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1	Tersedianya total pagu anggaran untuk prioritas pembangunan daerah	Tidak ada pagu anggaran prioritas pembangunan	Ada pagu anggaran prioritas pembangunan	
2	Pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap prioritas pembangunan daerah	Tidak ada pagu anggaran	Ada pagu anggaran	
3	Pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap program prioritas	Tidak ada pagu anggaran	Ada pagu anggaran	
4	Adanya dukungan pembiayaan non APBD yang tercantum dalam RKPD (CSR, KPBU, dll)	Tidak Ada	Ada	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (14,50%)

Nilai 19

19. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1	Kondisi eksisting kerangka ekonomi daerah yang meliputi: - Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Sektor - Tingkat Pengangguran - Inflasi - Kemiskinan	Tidak ada kerangka ekonomi daerah	Minimal tersedia kondisi eksisting untuk 3 poin pertama	
2	Proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi: - Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Sektor - Tingkat Pengangguran - Inflasi - Kemiskinan	Tidak ada proyeksi kerangka ekonomi	Minimal tersedia proyeksi untuk 3 poin pertama	
3	Arah kebijakan ekonomi daerah yang menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah	Tidak ada	Ada	
4	Kerangka pendanaan dilengkapi dengan proyeksi keuangan	Tidak ada kerangka pendanaan yang dilengkapi proyeksi keuangan	Ada kerangka pendanaan dilengkapi proyeksi keuangan	
5	Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah	Total rencana belanja daerah lebih kecil dari total belanja seluruh perangkat daerah	Total rencana belanja daerah lebih besar atau sama dengan total belanja seluruh perangkat daerah	
Jumlah Skor				

Catatan: Selisih pendapatan dengan belanja adalah dana bantuan sosial (asumsi)

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (14,50%)

Nilai 20

20. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap program prioritas pada PN RKP 2024

Bobot **6,00%**

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. PN 1 - Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024	Program daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
B. PN 2 - Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN 2 Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2024	Program daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
C. PN 3 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN 3 Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024	Program daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
D. PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024	Program prioritas daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
E. PN 5 -Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN 5 Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024	Program daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
F. PN 6 - Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% program prioritas pada PN 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% program prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024	Program daerah mendukung minimal 50% program prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024	
2	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2024 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan:

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Program prioritas RKP 2024 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai	0	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (14,50%)

Nilai 21

21. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Bobot 3,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Penerapan konsep tematik	Tidak ada prioritas pembangunan daerah	Ada prioritas pembangunan daerah	
2	Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	Tidak ada perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	Ada perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	
3	Penerapan konsep integratif terkait pelibatan OPD	Prioritas pembangunan daerah hanya melibatkan satu OPD	Prioritas pembangunan daerah melibatkan beberapa OPD	
4	Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah yang bersangkutan	Prioritas pembangunan daerah hanya melibatkan OPD di daerah bersangkutan	Prioritas pembangunan daerah melibatkan stakeholders di luar OPD di daerah bersangkutan	
5	Penerapan konsep spasial terkait penjabaran prioritas pembangunan daerah	Prioritas pembangunan daerah tidak dijabarkan dalam satu kesatuan wilayah	Prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam satu kesatuan wilayah	
6	Keruntutan penjelasan kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	Tidak runtut	Runtut terintegrasi dalam penjelasan prioritas pembangunan daerah	
7	Perencanaan menerapkan Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs)	Belum diterapkan	Sudah diterapkan	
8	Pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan	Tidak Ada	Ada	
Jumlah Skor				

Catatan:

- **Tematik** adalah tema-tema yang menjadi prioritas dalam satu jangka waktu tertentu
- **Holistik** artinya penjabaran tematik dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan
- **Integratif** artinya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan
- **Spasial** artinya kegiatan pembangunan yang direncanakan fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam kesatuan wilayah

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (14,50%)

Nilai 22

22. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas

Bobot 3,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	Tidak ada indikator kinerja	Ada indikator kinerja sasaran	
2	Penggunaan indikator dampak sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	Tidak ada	Ada	
3	Tersedianya indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak seluruh program memiliki indikator kinerja	Seluruh program memiliki indikator kinerja	
4	Penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak ada	Ada	
5	Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak semua indikator kinerja bersifat indikator hasil	Semua indikator kinerja bersifat indikator hasil	
Jumlah Skor				

Catatan: Referensi indikator dampak dan hasil bersumber dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



Penilaian Kualitatif Aspek Kualitas Dokumen

Keunggulan Daerah pada Aspek Kualitas Dokumen

Rekomendasi terhadap Aspek Kualitas Dokumen



❖ Kriteria Inovasi (20%)

23. Indikator kelengkapan dokumen Inovasi daerah

Nilai 23

Bobot 5,00%

Syarat inovasi yang dinilai:

1. Sesuai dengan tema RKP 2024 (Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
2. Dilakukan pada kurun waktu 2021 – 2024

Nama Inovasi yang dinilai: _____

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Penjelasan tentang keterkaitan inovasi dengan tema RKP 2024	Tidak ada	Ada	
2	Penjelasan tentang kerangka logis yang mendukung inovasi	Tidak ada	Ada	
3	Penjelasan tentang unsur kebaruan inovasi	Tidak ada	Ada	
4	Penjelasan tentang input anggaran inovasi	Tidak ada	Ada	
5	Penjelasan tentang <i>input</i> sumberdaya manusia inovasi	Tidak ada	Ada	
6	Penjelasan tentang kerangka tahapan pelaksanaan inovasi	Tidak ada	Ada	
7	Penjelasan tentang proses inovasi	Tidak ada	Ada	
8	Penjelasan tentang <i>output</i> inovasi	Tidak ada	Ada	
9	Penjelasan tentang <i>outcome</i> inovasi	Tidak ada	Ada	
10	<i>Stakeholders</i> yang terlibat	Tidak ada	Ada	
11	Pemantauan dan evaluasi	Tidak ada	Ada	
12	Permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut	Tidak ada	Ada	
13	Penjelasan tentang potensi replikasi dan keberlanjutan inovasi	Tidak ada	Ada	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85	4,62	5,38	6,15	6,92	7,69	8,46	9,23	10



❖ Kriteria Inovasi (20%)

Nilai 25

24. Indikator kedalaman inovasi daerah

Bobot 15,00%

Syarat inovasi yang dinilai:

1. Sesuai dengan tema RKP 2024 (Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
2. Dilakukan pada kurun waktu 2021 – 2024

Nama Inovasi yang dinilai: _____

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1	Kelengkapan komponen penyusun kerangka logis	Lemah	Kuat	
2	Keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan	Lemah	Kuat	
3	Keterkaitan penjelasan <i>output</i> dengan <i>outcome</i>	Lemah	Kuat	
4	Kesesuaian indikator <i>output</i> dengan <i>output</i> inovasi	Tidak sesuai	Sesuai	
5	Kesesuaian indikator <i>outcome</i> dengan <i>output</i> inovasi	Tidak sesuai	Sesuai	
6	<i>Output</i> inovasi	Belum ada / tidak ada penjelasan	Ada	
7	<i>Outcome</i> inovasi	Belum ada / tidak ada penjelasan	Ada	
8	Jenis kebaruan inovasi terkait (lingkup nasional)	Modifikasi/ Replikasi	Benar-benar baru	
9	Fase inovasi	Fase rencana	Sudah dilaksanakan	
10	Lingkup penerima manfaat inovasi	Sebagian wilayah	Seluruh wilayah	
11	Dukungan regulasi terhadap inovasi terkait	Tidak ada	Ada	
12	Bentuk dukungan regulasi terhadap inovasi terkait	Perkada, peraturan dinas, dll	Perda	
13	Keterkaitan inovasi dengan tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Lemah	Kuat	
14	Informasi monitoring dan evaluasi (internal OPD, <i>stakeholders</i> pelaksana, dan pengguna)	Tidak ada	Ada	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai	0	0,71	1,43	2,14	2,86	3,57	4,29	5	5,71	6,43	7,14	7,86	8,57	9,29	10



Penilaian Kualitatif Aspek Inovasi

Keunggulan Daerah pada Aspek Inovasi

Rekomendasi terhadap Aspek Inovasi



Lembar Pernyataan

Bersama ini saya menyatakan bahwa penilaian ini dilakukan secara profesional, jujur, bertanggung-jawab, dan tidak atas dasar tekanan dari pihak mana pun.

Demikian pernyataan ini.

Saya yang menyatakan:

Nama Lengkap Penilai

Tanda Tangan Penilai

Lembar ini ditandatangani oleh TPT PPD 2024



Lembar Penerimaan

Bersama ini saya menyatakan telah menerima hasil penilaian ini secara profesional, jujur, bertanggung-jawab, dan tidak atas dasar tekanan dari pihak mana pun.

Demikian pernyataan ini.

Saya yang menerima:

Nama Lengkap Penerima

Tanda Tangan Penerima

Lembar ini ditandatangani oleh Sekretariat PPD 2024



Lampiran 1

Urusan Wajib Pemerintah dan Kriteria Kewenangannya

No	Urusan Wajib Pemerintah (UU 23/2014 dan Permendagri 86/2017)
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.	Sosial
7.	Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan
10.	Pertanahan
11.	Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
18.	Penanaman Modal
19.	Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik
21.	Persandian
22.	Kebudayaan
23.	Perpustakaan
24.	Kearsipan

KRITERIA KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH			
No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Lokasinya lintas daerah kabupaten/kota	Lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
2.	Penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Penggunanya lintas daerah kabupaten/kota	Penggunanya dalam daerah kabupaten/kota
3.	Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota
4.	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
5.	Peranannya strategis bagi kepentingan nasional		



❖ Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2024

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan
			2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati
			3	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi
			4	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik
			5	Pengembangan Industri Pendukung EBT
		Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	6	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)
			7	Pengelolaan hutan berkelanjutan
			8	Penyediaan air untuk pertanian
			9	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas
			10	Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau
			11	Pengembangan waduk multiguna
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	12	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
			13	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
			14	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar
			15	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian
			16	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	17	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
			18	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya
			19	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta <i>database</i> kelautan dan perikanan
		Penguatan kewirausahaan, usaha	20	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
		mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	21	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
			22	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
			23	Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha
			24	Peningkatan nilai tambah usaha sosial
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	25	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
			26	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter, kawasan industri terutama di luar Jawa
			27	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok
			28	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
			29	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan
			30	Pengembangan industri halal
			31	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	32	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
			33	Pengelolaan impor
			34	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
			35	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global
			36	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif
			37	Peningkatan pendalaman sektor keuangan
		Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	38	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
			39	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga
			40	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata
			41	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
2	Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan wilayah Sumatera	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Kalimantan	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Maluku	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
			1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
		Pembangunan Wilayah Papua	4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
			1	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
			2	Integrasi sistem administrasi kependudukan
			3	Pendampingan dan layanan terpadu
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
			5	Sistem jaminan sosial nasional
			6	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
			7	Perlindungan sosial adaptif
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	8	Kesejahteraan sosial
			9	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi
			10	Percepatan perbaikan gizi masyarakat
			11	Peningkatan pengendalian penyakit
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	12	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
			13	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
			14	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
			15	Afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun
		Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	16	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
			17	Penjaminan mutu Pendidikan
			18	Peningkatan tata kelola pendidikan
			19	Pemenuhan hak dan perlindungan anak
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	20	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
			21	Kualitas pemuda
		Pengentasan kemiskinan	22	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
			23	Keperantaraan usaha dan dampak sosial
			24	Reformasi agraria



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
			25	Perhutanan sosial
		Peningkatan produktivitas dan daya saing	26	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan sbudaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	27	Prestasi Olahraga
			1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti
			2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
			3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter
			4	Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental
			5	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	6	Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
			6	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
			7	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
			8	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memepkuat kebudayaan yang inklusif
		Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	9	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
			10	Peningkatan budaya literasi
			11	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra
			12	Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta
			13	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur pelayanan dasar	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
			2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
			3	Keselamatan dan keamanan transportasi
			4	Waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2024
		Infrastruktur ekonomi	5	Konektivitas jalan
			6	Konektivitas Laut
			7	Konektivitas Udara
			8	Konektivitas darat
		Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	9	Transportasi perkotaan
			10	Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan
			11	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan
			12	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan (khusus penilaian provinsi)	13	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan
			14	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan
			15	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik
		Transformasi digital	16	Penuntasan infrastruktur TIK
			17	Pemanfaatan infrastruktur TIK
			18	Fasilitas pendukung transformasi digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			4	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	5	Penanggulangan bencana
			6	Peningkatan ketahanan iklim
		Pembangunan rendah karbon	7	Pembangunan energi berkelanjutan
			8	Pemulihan lahan berkelanjutan
			9	Pengelolaan limbah
			10	Pengembangan industri hijau
			11	Rendah karbon pesisir dan laut



"Halaman ini sengaja dikosongkan"





**Kementerian PPN/
Bappenas**



**Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2024**



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah**

**Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan**

Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



Phone

(021) 50927413



Email & Online

Email: dit.peppd@bappenas.go.id



[dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id